

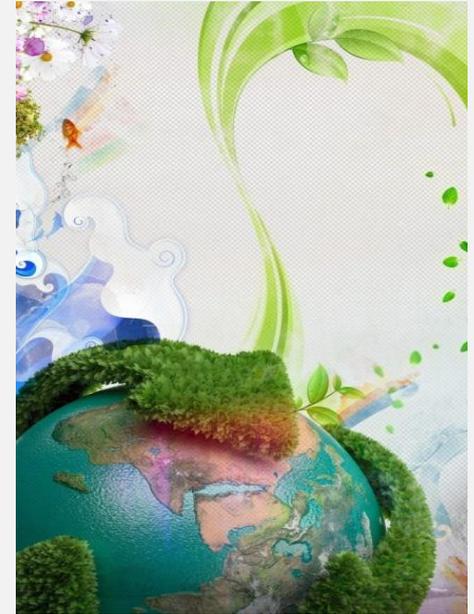
Dukungan Komisi IV DPR RI dalam Pencapaian Sergap, Optimalisasi Pemanfaatan Alsintan dan Luas Tambah Tanam (LTT)

Edhy Prabowo, MM., MBA

Ketua Komisi IV DPR RI

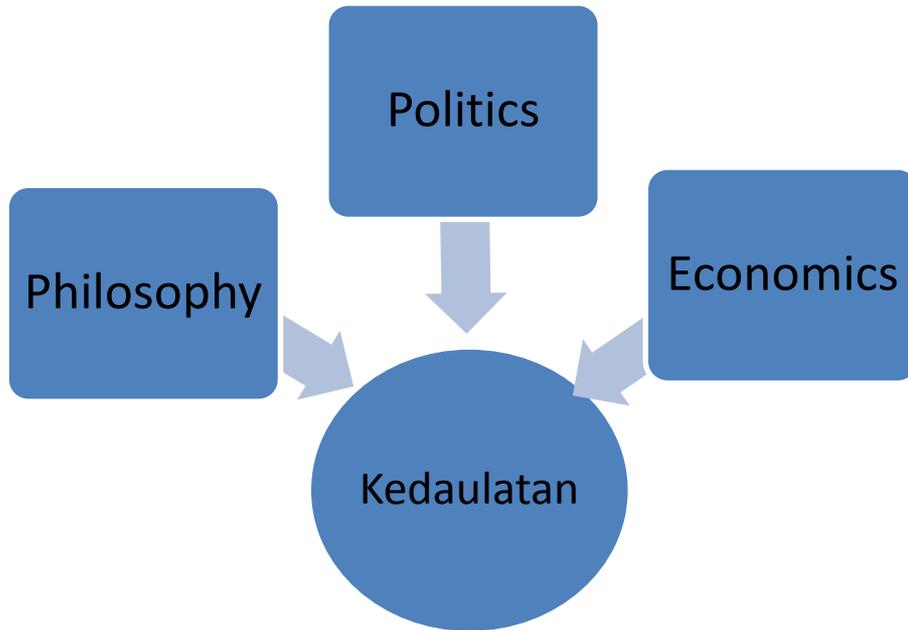
Pertanian Masa Mendatang Dalam Rangka Pencapaian Kesejahteraan

1. Swasembada & swasembada berkelanjutan:
Beras, Jagung, Kedelai, Gula, Daging
2. Diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal:
Potensi kelautan, tanaman pangan, hortikultura
3. Peningkatan nilai tambah & daya saing ekspor pertanian :
Potensi kelautan, hortikultura, perkebunan
4. Peningkatan kesejahteraan petani, pekebun, peternak,
nelayan & pembudidaya ikan



Pertanian berdaya saing, mandiri & berdaulat

Tinjauan Yuridis, Sosial dan Politik Kebijakan Pertanian



- ✓ Pancasila Sila ke-5
- ✓ UUD RI Pasal 28A, Pasal 28 C ayat (1) serta Pasal 33 ayat (2) dan (3)
- ✓ UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- ✓ UU No 19/2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pangan adalah kebutuhan dasar untuk dan merupakan hak asasi setiap warganegara yang wajib disediakan oleh negara

Pemerintah harus mengendalikan, bukan pasar!!

Tantangan Utama Pembangunan Nasional



Pertumbuhan ekonomi melambat



Upaya akselerasi dan perbaikan daya saing



Kemiskinan dan kesenjangan



Pengangguran dan produktivitas



Pembangunan perspektif gender (pengarusutamaan gender)



Stunting dan kualitas sumber daya manusia



Resiko dan pembiayaan dampak bencana alam

KENDALA STRUKTURAL di SEKTOR PERTANIAN

Ketergantungan pada bahan pangan tertentu; sebaran produksi pangan tidak merata

Konversi lahan pertanian yang masih tinggi; akses kepada lahan pertanian semakin sulit

Keterbatasan akses permodalan dan pembiayaan; teknologi informasi

Kapasitas SDM yang masih harus ditingkatkan

Adopsi inovasi teknologi masih relatif rendah

Sarana dan prasarana produksi pertanian masih perlu ditingkatkan

Hilirisasi dan teknologi pascapanen masih perlu ditingkatkan

Akses pasar dan jaminan harga belum menguntungkan petani

What's Next??

Mendorong peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, inovasi bibit unggul, pengendalian impor pangan

Meningkatkan produktivitas lahan dan tenaga kerja pertanian yang didukung dengan mekanisasi dan penerapan teknologi tepat guna.

Meningkatkan proses industrialisasi dan hilirisasi produk pertanian yang akan menjadi katalis untuk mendorong peningkatan hasil sektor pertanian

Optimalisasi infrastruktur dan korporasi petani untuk peningkatan produksi dan ekspor pangan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Fokus kebijakan → optimalisasi penyerapan gabah, optimalisasi pe

Fokus Kebijakan Pembangunan Pertanian

Peningkatan produksi beras melalui optimalisasi pencapaian penyerapan gabah



Optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian



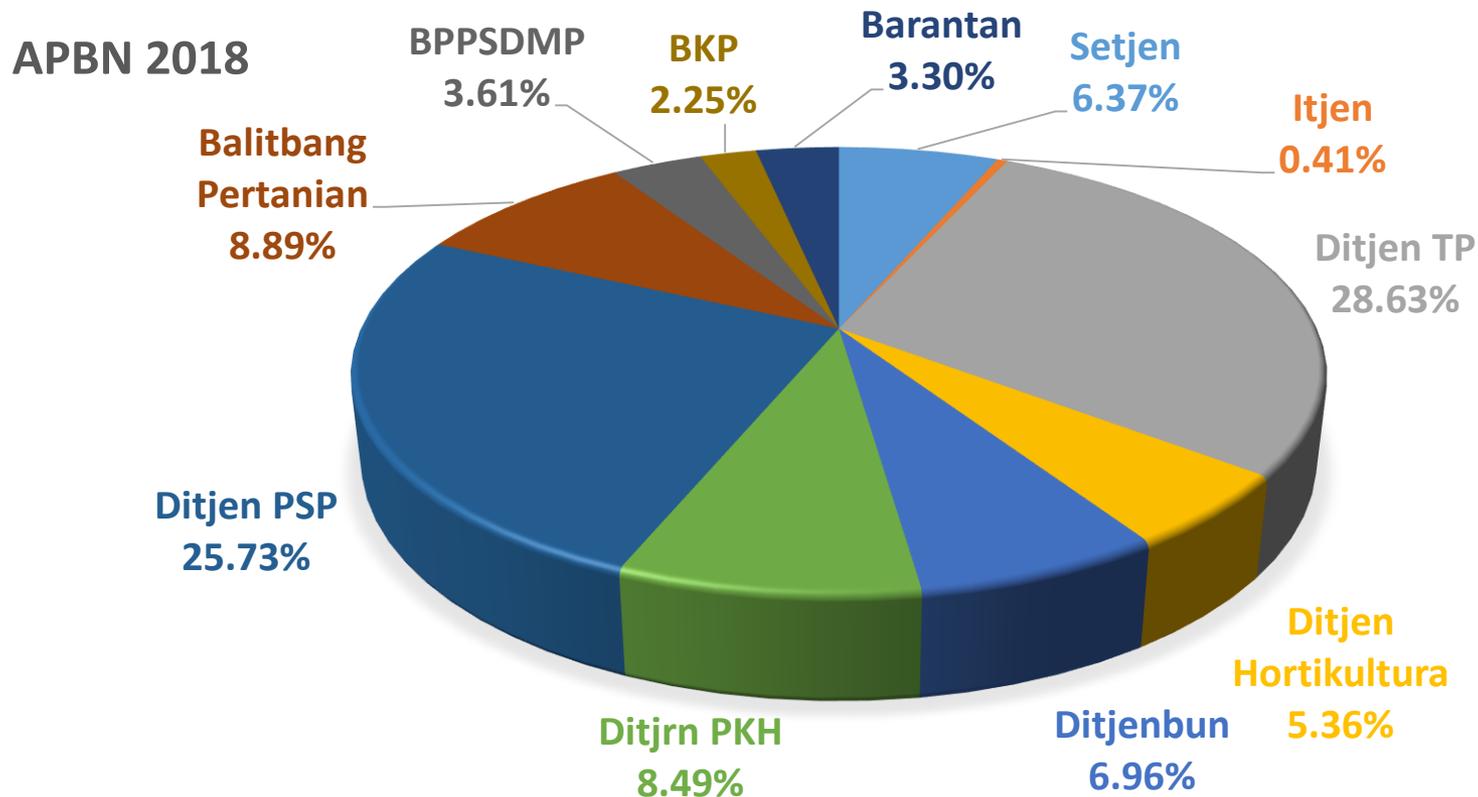
Peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT)

Dukungan Komisi IV DPR RI dalam Pencapaian Sergap,
Optimalisasi Pemanfaatan Alsintan dan
Luas Tambah Tanam (LTT)

Dukungan Politik Anggaran Bidang Pertanian

KEMANTAN	APBN 2017	APBN 2018
SETJEN	1,446,100,068,000	1,492,092,430,000
ITJEN	92,439,375,000	97,134,000,000
DITJEN TP	7,162,403,488,000	6,712,058,351,000
DITJEN HORTIKULTURA	1,443,187,209,000	1,255,960,980,000
DITJENBUN	1,148,531,631,000	1,631,801,109,000
DITJRN PKH	1,887,642,254,000	1,989,188,476,000
DITJEN PSP	6,926,098,850,000	6,030,828,749,000
BALITBANG PERTANIAN	1,658,659,094,000	2,084,560,880,000
BPPSDMP	1,207,410,450,000	847,149,323,000
BKP	452,129,796,000	527,612,000,000
BARANTAN	802,283,500,000	773,184,990,000
TOTAL	24,226,885,715,000	23,441,571,288,000

Persentase Anggaran Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian terhadap Total Anggaran Kementerian Pertanian



Dukungan Legislasi Komisi IV DPR RI dalam Upaya Pencapaian Sergap, Optimalisasi Pemanfaatan Alsintan dan Luas Tambah Tanam (LTT)

- UU No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman
- UU No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
- UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- UU No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
- UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- UU No 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

PENUTUP

- ✓ **Memberikan dukungan terhadap program strategis kebijakan pertanian terutama pencapaian swasembada pangan oleh seluruh pemangku kepentingan melalui pengembangan inovasi teknologi pertanian serta penyebaran/sosialisasinya ;**
- ✓ **Memberikan dukungan baik dalam bentuk anggaran, kebijakan, dan peraturan perundangan terhadap Pencapaian Sergap, Optimalisasi Pemanfaatan Alsintan dan Luas Tambah Tanam (LTT)**
- ✓ **Memberikan dukungan dan meminta kepada Pemerintah agar berkomitmen untuk melakukan percepatan pengembangan dan adopsi teknologi pertanian yang sudah teruji efektif, efisien dan bermanfaat;**
- ✓ **Kebijakan pembangunan pertanian harus dilakukan dengan optimal dan sinergis secara internal, yang didukung oleh *stakeholders* lain seperti Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.**

TERIMA KASIH



KOMISI IV DPR RI
BIDANG PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,
KEHUTANAN, SERTA PANGAN